

Tantangan Program Resap Aspirasi Masyarakat Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lamongan Studi Kasus DPRD Lamongan

Nisrina Zakiya Citrani^{1*}

¹Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur, 60237

[*nisrinazakiyacitrani@gmail.com](mailto:nisrinazakiyacitrani@gmail.com)

ABSTRAK

Program Resap Aspirasi Masyarakat yang diinisiasi oleh DPRD Lamongan bertujuan untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, memastikan suara dan kebutuhan masyarakat diakomodasi dalam kebijakan daerah. Menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks, program ini dirancang untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat melalui kunjungan desa, dialog interaktif, survei, dan teknologi informasi. Menggunakan teori komunikasi politik Harold Lasswell, penelitian ini menganalisis proses komunikasi antara DPRD dan masyarakat. Metode kualitatif studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat, perbaikan sistem pengumpulan data, transparansi, koordinasi antar lembaga, dan responsivitas terhadap umpan balik adalah kunci untuk mengatasi masalah pelaksanaan program. Implementasi solusi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan memastikan kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat, mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Lamongan.

Kata kunci: Kebijakan Daerah, Komunikasi Politik, Partisipasi Masyarakat.

ABSTRACT

The Resap Community Aspiration Program initiated by the Lamongan Regional People's Representative Council (DPRD) aims to bridge the gap between the government and the community, ensuring that the voices and needs of the people are accommodated in local policies. Faced with complex social, economic, and political challenges, the program is designed to facilitate communication between the community and their representatives through village visits, interactive dialogues, surveys, and information technology. Using Harold Lasswell's theory of political communication, this research analyzes the communication process between the DPRD and the community. A qualitative literature study method is employed to gather and analyze various relevant literature sources. The research findings indicate that increasing community participation, improving data collection systems, transparency, inter-agency coordination, and responsiveness to feedback are key to addressing implementation challenges. The implementation of these solutions is expected to enhance public trust in local government and ensure that policies truly reflect the aspirations of the community, thereby promoting inclusive and sustainable development in Lamongan.

Keywords: Community Participation, Local Policy, Political Communication.

1. PENDAHULUAN

Program Resap Aspirasi Masyarakat merupakan salah satu inisiatif strategis yang diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan memastikan bahwa suara serta kebutuhan masyarakat dapat tersampaikan dan diakomodasi dalam kebijakan daerah. Sebagai sebuah kabupaten yang terus berkembang, Lamongan menghadapi berbagai tantangan dan dinamika sosial, ekonomi, serta politik yang kompleks. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi sangat penting untuk mencapai pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel.

Resap Aspirasi Masyarakat adalah program yang dirancang untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat mereka. Program ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami permasalahan serta aspirasi yang dihadapi oleh masyarakat di berbagai wilayah di Lamongan. Dengan adanya program ini, DPRD Lamongan berupaya untuk mendengarkan secara langsung keluhan, masukan, dan harapan masyarakat terkait pembangunan dan pelayanan publik. Ini adalah langkah penting dalam demokrasi partisipatif di mana masyarakat memiliki peran aktif dalam menentukan arah kebijakan yang akan diambil (Kurniasih & Rusfiana, 2021). Konteks historis dan sosiopolitik Lamongan juga memberikan latar belakang penting bagi pelaksanaan Program Resap Aspirasi Masyarakat. Lamongan, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, memiliki sejarah panjang dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan daerah. Kabupaten ini dikenal dengan kekayaan budaya, potensi alam, dan sektor ekonomi yang beragam, mulai dari pertanian, perikanan, hingga industri kecil dan menengah. Namun, seperti daerah lainnya, Lamongan juga menghadapi berbagai permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, infrastruktur yang belum memadai, serta layanan publik yang perlu ditingkatkan (Suharti, 2014). Dalam konteks inilah, DPRD Lamongan merasa perlu untuk mengimplementasikan Program Resap Aspirasi Masyarakat sebagai upaya untuk mengidentifikasi secara lebih detail permasalahan yang dihadapi oleh warga serta mencari solusi yang lebih tepat sasaran. Program ini juga menjadi sarana penting untuk

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan daerah, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Metode yang digunakan dalam Program Resap Aspirasi Masyarakat melibatkan berbagai pendekatan, mulai dari kunjungan langsung ke desa-desa, dialog interaktif, survei, hingga penggunaan teknologi informasi untuk menjaring masukan masyarakat. Kunjungan langsung ke lapangan memungkinkan anggota DPRD melihat secara langsung kondisi yang dihadapi oleh warga, sedangkan dialog interaktif memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan masukan mereka secara langsung. Survei dan penggunaan teknologi informasi juga mempermudah pengumpulan data dan analisis secara lebih cepat dan akurat.

Pelaksanaan Program Resap Aspirasi Masyarakat juga tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa setiap suara dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok marjinal dan rentan, dapat terakomodasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya berpihak pada sebagian kelompok saja, tetapi juga inklusif dan adil bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu, tantangan lain adalah dalam hal tindak lanjut dari hasil resapan aspirasi tersebut. Aspirasi masyarakat harus diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret yang dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien (Goni et.al., 2019).

Tantangan DPRD di bidang serap aspirasi masyarakat ini sangat menarik karena masyarakat Lamongan merasa bahwa suara aspirasinya tidak pernah didengar. Aspirasi juga mencakup beberapa aspek dari peran anggota DPRD dalam menerima dan mengolah aspirasi masyarakat. Tinjauan literatur mengenai penelitian ini menunjukkan bahwa anggota DPRD memiliki peran penting dalam menerima dan mengolah aspirasi masyarakat, yang dapat menjadi sumber daya untuk pengembangan wilayah. Tetapi, penelitian juga menunjukkan bahwa penyerapan aspirasi masyarakat di DPRD masih terbatas, yang dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, seperti kekurangan informasi, keterbatasan waktu dan angka partisipan, serta kekurangan kemampuan anggota DPRD dalam menerima dan mengolah aspirasi masyarakat. Sesuai peraturan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten lamongan

tentang tata tertib dan kode etik BAB XV tentang pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat pasal 151 nomor 5 dengan bunyi pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program reses DPRD merupakan cerminan pentingnya peran DPRD dalam konteks sistem demokrasi di tingkat daerah. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD memiliki tanggung jawab utama dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan di wilayahnya. Dalam konteks ini, program reses menjadi salah satu mekanisme yang memungkinkan anggota DPRD untuk berinteraksi langsung dengan konstituennya. Melalui program ini, mereka dapat mendengarkan aspirasi, keluhan, serta masalah yang dihadapi oleh masyarakat di wilayahnya.

Partisipasi masyarakat dalam program reses DPRD memiliki peran penting dalam memperkuat demokrasi lokal. Program ini memberikan kesempatan bagi warga untuk turut serta dalam proses politik, menyampaikan aspirasi, dan menyoroti berbagai masalah yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Dengan demikian, program reses tidak hanya menjadi forum dialog antara anggota DPRD dan masyarakat, tetapi juga menjadi wahana untuk membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan konstituen mereka.

Evaluasi terhadap efektivitas program reses DPRD menjadi aspek penting dalam menilai kinerja dan keterhubungan DPRD dengan masyarakat. Evaluasi ini dapat melibatkan pemantauan terhadap tingkat partisipasi masyarakat, jenis masalah yang dibahas, serta respons dan tindak lanjut dari anggota DPRD terhadap aspirasi dan masalah yang disampaikan. Selain itu, program reses juga menjadi indikator kinerja DPRD secara keseluruhan dalam melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat di wilayahnya.

Dalam konteks transparansi dan akuntabilitas, program reses DPRD juga memiliki peran yang signifikan. Dengan menyelenggarakan pertemuan reses secara terbuka dan terukur, anggota DPRD dapat memperlihatkan kepada masyarakat apa yang telah mereka lakukan dan bagaimana mereka merespons masalah-masalah yang dihadapi oleh konstituen. Dengan demikian, program reses bukan hanya menjadi sarana untuk

memperjuangkan aspirasi masyarakat, tetapi juga untuk memperkuat keterbukaan dan akuntabilitas dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat di tingkat daerah.

2. METODE PENELITIAN

Metode kualitatif dalam penelitian studi literatur melibatkan analisis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, dengan fokus pada pemahaman mendalam terhadap konsep, teori, temuan, atau isu yang dibahas. Pengertian dari metode ini adalah melakukan penelitian yang berfokus pada pemahaman kualitatif atau deskriptif terhadap topik tertentu, tanpa menggunakan data statistik atau pengukuran kuantitatif (Firmansyah & Masrun, 2021). Dalam konteks penelitian Program resap aspirasi masyarakat di DPRD Lamongan, metode kualitatif studi literatur dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dokumen resmi DPRD, dan artikel berita yang relevan dengan topik tersebut. Penelitian ini akan mengedepankan analisis mendalam terhadap berbagai perspektif, pendekatan, dan temuan yang telah ada sebelumnya terkait dengan hubungan antara DPRD dan masyarakat serta implementasi program aspirasi publik. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, dinamika, dan tantangan yang terkait dengan komunikasi politik antara DPRD dan masyarakat Lamongan secara komprehensif, serta untuk mengidentifikasi kebutuhan penelitian lanjutan atau pemecahan masalah yang mungkin terjadi. Selain itu, metode kualitatif studi literatur juga dapat membantu dalam menyusun landasan teoritis yang kuat untuk penelitian lebih lanjut tentang topik tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Program Resap Aspirasi Masyarakat DPRD Lamongan 2024

Program Resap Aspirasi Masyarakat di DPRD Lamongan 2024 menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan beragam, mencerminkan dinamika politik, sosial, dan ekonomi di wilayah tersebut. Tantangan ini bisa dilihat dari berbagai perspektif, termasuk partisipasi masyarakat, efisiensi birokrasi,

keterbukaan informasi, hingga adaptasi teknologi.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses aspirasi publik. Meski program ini dirancang untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, banyak warga Lamongan yang masih enggan atau merasa tidak punya cukup waktu dan kesempatan untuk terlibat aktif dalam menyampaikan aspirasinya. Faktor-faktor seperti kesibukan sehari-hari, kurangnya pengetahuan tentang mekanisme partisipasi, serta apatisme politik seringkali menjadi penghalang. Untuk mengatasi ini, DPRD Lamongan perlu menerapkan strategi edukasi yang efektif serta menyediakan platform partisipasi yang lebih fleksibel dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Singkatnya tanggal yang ditentukan oleh badan musyawarah DPRD Lamongan. Tanggal yang ditentukan merupakan keputusan dari hasil rapat badan musyawarah (banmus) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2024. dari keputusan tersebut, reses tahap 1 tahun 2024 ditentukan pada tanggal 17-19 bulan Maret tahun 2024 di masing-masing dapil. Rapat banmus dihadiri oleh sekitar 25 orang anggota dewan. Dengan undangan rapat 50 orang anggota dewan sehingga rapat akan dimulai ketika didalam ruangan sudah quorum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pada DPRD bahwa harus secara aktif berinteraksi dengan konstituennya masing-masing untuk menyerap aspirasi dan masukan masyarakat. Namun, dengan waktu reses yang sangat singkat dan terbatas, anggota DPRD terpaksa harus membatasi jumlah interaksi dan kunjungan, sehingga tidak semua suara masyarakat pada bagiannya dapat terdengar. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap anggota dewan mereka.

Pendanaan yang kurang. Pendaan reses sudah diatur pada Undang-Undang PP No 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Disebutkan pada pasal 8 nomor 3 menjelaskan bahwa tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Masalah pendanaan yang kurang memadai. Anggaran yang disediakan untuk program reses seringkali tidak cukup untuk menutupi seluruh biaya yang dibutuhkan,

termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan penyelenggaraan acara pertemuan dengan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efektif dan efisien. Namun, dengan alokasi dana yang minim, anggota DPRD harus mencari cara untuk melakukan reses dengan anggaran yang terbatas, yang seringkali berujung pada pengurangan jumlah kunjungan atau kualitas interaksi dengan masyarakat. Pendanaan yang tidak memadai ini juga bisa membatasi kemampuan anggota DPRD untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara optimal.

Urusan pribadi dewan. Urusan pribadi memang tidak pernah bisa untuk dihindari, pasalnya masing-masing anggota dewan tentu memiliki kegiatan lain diluar pekerjaannya sebagai dewan. Pada reses 1 tahun 2024 ini, tercatat ada 1 anggota yang tidak bisa mengikuti kegiatan reses ini diakibatkan urusan ibadah umroh bersama keluarga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengharuskan anggota DPRD untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab. Ketika urusan pribadi seperti umroh dilakukan pada waktu yang berdekatan dengan jadwal reses, hal ini dapat mengganggu komitmen anggota dewan untuk menjalankan tugas reses secara maksimal. Kegiatan pribadi ini, meskipun penting, seharusnya tidak mengurangi waktu dan perhatian yang harus diberikan kepada masyarakat.

Efisiensi birokrasi juga menjadi tantangan signifikan. Proses pengumpulan, verifikasi, dan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak di pemerintahan (Annas & Anirwan, 2019). Namun, seringkali birokrasi yang berbelit-belit dan kurangnya sinergi antar instansi menyebabkan lambatnya respons dan implementasi program. Untuk mengatasi hal ini, reformasi birokrasi yang menekankan pada peningkatan koordinasi antar lembaga dan percepatan proses administrasi menjadi krusial. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendigitalkan proses pengumpulan dan pengolahan data juga dapat membantu meningkatkan efisiensi.

Tantangan lainnya adalah keterbukaan informasi. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai bagaimana aspirasi mereka diproses dan

diimplementasikan. Kurangnya transparansi bisa menimbulkan ketidakpercayaan dan skeptisisme terhadap program ini. DPRD Lamongan perlu memastikan bahwa informasi mengenai program RESAP, termasuk tujuan, proses, dan hasil akhirnya, disampaikan dengan jelas dan terbuka kepada publik. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media massa, media sosial, serta pertemuan langsung dengan masyarakat.

Dalam era digital, adaptasi terhadap teknologi menjadi suatu keharusan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil atau kurang terjangkau, memiliki akses terhadap teknologi yang digunakan dalam program Resap. Tidak semua warga memiliki akses yang memadai ke internet atau perangkat digital, yang dapat menghambat partisipasi mereka dalam program ini. DPRD Lamongan harus bekerja sama dengan penyedia layanan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas dan melakukan sosialisasi mengenai cara menggunakan teknologi tersebut untuk menyampaikan aspirasi.

Lamongan adalah daerah dengan keanekaragaman budaya, agama, dan sosial yang tinggi. Memastikan bahwa program Resap dapat mengakomodasi aspirasi dari seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok minoritas dan marjinal, adalah tantangan yang tidak bisa diabaikan. Program ini harus dirancang secara inklusif, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi semua kelompok masyarakat. Pelibatan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal dari berbagai latar belakang bisa menjadi salah satu cara untuk menjamin inklusivitas ini.

Mengukur efektivitas dan dampak dari program Resap juga merupakan tantangan penting. Tanpa alat ukur yang tepat, sulit untuk menilai sejauh mana program ini berhasil mencapai tujuannya. DPRD Lamongan perlu mengembangkan indikator kinerja yang jelas dan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Penelitian dan survei lapangan dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan umpan balik dari masyarakat terkait implementasi program ini.

Dukungan politik dari berbagai pihak, termasuk partai politik dan pejabat pemerintah, sangat penting untuk keberhasilan program

Resap. Kurangnya dukungan politik bisa menghambat implementasi program ini, baik dalam bentuk regulasi yang mendukung maupun alokasi anggaran yang memadai. Selain itu, ketersediaan dana yang cukup untuk menjalankan program ini juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. DPRD Lamongan harus memastikan bahwa ada komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan dan bahwa anggaran yang dialokasikan cukup untuk mendukung pelaksanaan program ini secara berkelanjutan (Utomo & Cangara, 2013).

Terakhir, kemampuan DPRD Lamongan untuk merespons kritik dan saran dari masyarakat adalah kunci keberhasilan program Resap. Kritik dan saran yang konstruktif dapat menjadi masukan berharga untuk perbaikan program. Oleh karena itu, DPRD harus bersikap terbuka dan responsif terhadap umpan balik yang diberikan oleh masyarakat. Membangun saluran komunikasi dua arah yang efektif, di mana masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan kritik dan saran serta mendapatkan tanggapan yang cepat dan memadai, sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik.

Program Resap Aspirasi Masyarakat DPRD Lamongan 2024 menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan pendekatan komprehensif dan kolaboratif untuk diatasi. Partisipasi masyarakat, efisiensi birokrasi, keterbukaan informasi, adaptasi teknologi, inklusivitas, pengukuran dan evaluasi, dukungan politik dan keuangan, serta responsivitas terhadap kritik dan saran adalah beberapa aspek penting yang perlu mendapat perhatian serius. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini secara efektif, DPRD Lamongan dapat memastikan bahwa program Resap berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan utamanya yaitu meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

Adapun hasil reses sesuai daerah pilihan masing-masing Daerah pilihan 1 mencakup Desa Deket, Glagah, Karangbinangun, Lamongan, Sarirejo, Tikung. Adapun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lamongan Dapil 1 yaitu Muhammad Burhanuddin, S.Sos, Mahfud Shodiq, S.Sos., Abd.Shomad, S.Pd., Ir. Supono, Miftahul Khoir Efendi, S.E., H.Kaharuddin, S.H., Budi Sulis Setiyo, Rayke Ria, A.Md.Keb.,

Moch. Arif Ansori, Siti Maskamah Mursyid, S.E.

- Berikut adalah hasil serap aspirasi masyarakat oleh Mahfud Shodiq, S.Sos.selaku Anggota DPRD dapil 1 yaitu pembangunan jalan, bantuan keuangan untuk masjid, pembangunan air bersih.
- Berikut adalah hasil serap aspirasi masyarakat oleh Ir. Supono, S.Sos.selaku Anggota DPRD dapil 1 yaitu pengerukan waduk, pembangunan lapangan voly, pembangunan jalan poros.
- Berikut adalah hasil serap aspirasi masyarakat oleh H.Kaharuddin, S.H.selaku Anggota DPRD dapil 1 yaitu pembangunan masjid, pembangunan TPT, pembangunan jalan.
- Berikut adalah hasil serap aspirasi masyarakat oleh Budi Sulis Setiyo selaku Anggota DPRD dapil 1 yaitu normalisasi sungai telaga Bandung, kegiatan kepemudaan.
- Berikut adalah hasil serap aspirasi masyarakat oleh Moch. Arif Ansori selaku Anggota DPRD dapil 1 yaitu pengerukan saluran air, foging, perbaikan jalan kampung, pernaikan jalan akses ke makam, bantuan seragam fatayat, kualitas air pdam

Daerah Pilihan 2 mencakup Desa Sukorame, Bluluk, Modo, Ngimbang, Sambeng, Mantup, Kembangbahu. Adapun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lamongan Dapil 2 yaitu H.Abdul Ghofur, Fatin Sufairoh, S.KM., Drs.H.Suhartono, Agus Sulistyo Rekso Negoro, S.Hut., Drs.Kacung Purwanto, Drs.Naim, M.Ag., Drs.H.Husnul Aqib, M.M., Wiji, S.E., Retno Wardhani, S.Kom., M.Kom. Moch.Dahlan

- Berikut adalah hasil serap aspirasi masyarakat oleh Drs.Naim, M.Ag.selaku Anggota DPRD dapil 2 yaitu pembangunan pada lembaga pendidikan, pembangunan tempat ibadah, pembangunan jalan poros.
- Berikut adalah hasil serap aspirasi masyarakat oleh Retno Wardhani, S.Kom.selaku Anggota DPRD dapil 2 yaitu permohonan bantuan pertanian terutama di pupuk itu sulit, kesejahteraan tokoh agama.
- Berikut adalah hasil serap aspirasi masyarakat oleh Fatin Sufairoh, S.KM.selaku Anggota DPRD dapil 2 yaitu rehabilitas mushola

- Berikut adalah hasil serap aspirasi masyarakat oleh Moch.Dahlan selaku Anggota DPRD dapil 2 pembangunan jalan sumbersaji
- Berikut adalah hasil serap aspirasi masyarakat oleh Agus Sulistyo Rekso Negoro, S.Hut.selaku Anggota DPRD dapil 2 yaitu normalisasi saluran air, pembangunan TPT desa Ngimbang
- Berikut adalah hasil serap aspirasi masyarakat oleh Drs.H.Husnul Aqib, M.M. Anggota DPRD dapil 2 yaitu rehabilitas sekolah, pembangunan masjid
- Berikut adalah hasil serap aspirasi masyarakat oleh Drs.H.Suhartono Anggota DPRD dapil 2 yaitu uji usaha tani, pembangunan jalan poros, saluran air, normalisasi waduk
- Berikut adalah hasil serap aspirasi masyarakat oleh H.Abdul Ghofur Anggota DPRD dapil 2 yaitu pembangunan MI
- Berikut adalah hasil serap aspirasi masyarakat oleh Drs.Kacung Purwanto Anggota DPRD dapil 2 yaitu pembangunan gapura, Pembangunan TPT, renovasi tempat ibadah, normalisasi saluran iar, pembangunan jalan.

Daerah Pilihan 3 Mencakup Desa Babat, Kedumpring, Sugio, dan Pucuk. Adapun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lamongan Dapil 3 yaitu Mukhammad Freddy Wahyudi, S.E., Saifuddin Zuhri, Srinoto, S.E., Dra. HJ.Zulaichah, AK., Sholihin, S.H., Didik Biyanto, Abdul Aziz, Ahmad, S.Ag., Dra.Noor Fatonah, Sri Setyowati.

- Berikut adalah hasil serap aspirasi masyarakat oleh Sri Setyowati selaku Anggota DPRD dapil 3 yaitu masyarakat mengharapkan untuk pembangunan infrastruktur didaerahnya masih banyak yang rusak dan pengadaan pupuk pertanian agar tidak terjadi kelangkaan seperti sebelumnya.
- Berikut adalah hasil serap aspirasi masyarakat oleh Ddik Biyanto selaku Anggota DPRD dapil 3 yaitu perbaikan jalan majenang dan Gondang banyak jalan berlubang, kurangnya penerangan jalan kedumpring dan jalan gondang
- Berikut adalah hasil serap aspirasi masyarakat oleh Sholihin, S.H selaku Anggota DPRD dapil 3 yaitu saluran air desa podang, perbaikan jalan Gotong Royong

Babat, pengerukan waduk Sogo, dan perbaikan jalan Desa Karipan

- Berikut adalah hasil serap aspirasi masyarakat oleh Saifuddin Zuhri selaku Anggota DPRD dapil 3 yaitu pembangunan jalan, normalisasi saluran pengairan sawah, bantuan hibah kelembaga pendidikan, pembangunan tempat ibadah, bantuan untuk petani.
- Berikut adalah hasil serap aspirasi masyarakat oleh Dra.HJ.Zulaichah, AK selaku Anggota DPRD dapil 3 yaitu bantuan terkait pembangunan masjid, pembangunan jalan pertanian dalam bertransportasi, pembagunan jalan poros desa, saluran air pertanian
- Berikut adalah hasil serap aspirasi masyarakat oleh Ahmad, S.Ag. selaku Anggota DPRD dapil 3 yaitu pembagunan masjid/rehab masjid, pembangunan TPT, membutuhkan bantuan alat bajak sawah
- Berikut adalah hasil serap aspirasi masyarakat oleh Srinoto, S.E. selaku Anggota DPRD dapil 3 yaitu renovasi mushola, Penguasaan seragam fatayat, pembangunan masjid.
- Berikut adalah hasil serap aspirasi masyarakat oleh Abdul Aziz selaku Anggota DPRD dapil 3 yaitu pengadaan mesin pertanian, menambah pupuk bersubsidi, pengasapan/foging untuk mencegah terjadinya penyakit, pembangunan jalan poros antar kecamatan.
- Berikut adalah hasil serap aspirasi masyarakat oleh Fredy wahyudi selaku Anggota DPRD dapil 3 yaitu pembangunan tpq, renov masjid, perbaikan jalan sawah, renovasi sekolah Daerah

Pilihan 4 Mencakup Desa Brondong, Laren, Paciran, Solokuro. Adapun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lamongan Dapil 4 yaitu Kasdono, S.E., Aslichah, S.Pd., Imam Fadli, S.IP., M.Si., Drs. H. Darwoto, M.M., H. M. Nurul Huda A.S., Drs. Mutoyo, M.Pd., Ali Mahfudi, S.Pd., S.H., M.M., Matlubur Rifa, S.H., M.Pd., Hj. Dian Zudiana, Yanuar Yudha Prasetya, S.IP. Ratna Mutia, sigit

- Berikut adalah hasil serap aspirasi masyarakat oleh Aslichah, S.Pd.selaku Anggota DPRD dapil 4 yaitu pengadaan bibit jagung yang cocok,antisipasi harga yang anjlok/gagal panen

- Berikut adalah hasil serap aspirasi masyarakat oleh Ali Mahfudi, S.Pd selaku Anggota DPRD dapil 4 yaitu pembangunan jalan poros bulubrangsi, pembangunan TPT jalan poros, pembangunan tempat ibadah
- Berikut adalah hasil serap aspirasi masyarakat oleh Imam Fadli, S.IP., M.Si.selaku Anggota DPRD dapil 4 yaitu bantuan dana/beasiswa, bantuan kelompok wirausaha desa, pembangunan jalan rabat beton, alokasi/bantuan untuk pemuda sendangagung
- Berikut adalah hasil serap aspirasi masyarakat oleh Ratna Mutia.selaku Anggota DPRD dapil 4 yaitu penguasaan seragam fatayat, rehab mushola, perbaikan lapangan volley, pembanguna TPT.
- Berikut adalah hasil serap aspirasi masyarakat oleh H.M.Nurul Huda A.S..selaku Anggota DPRD dapil 4 yaitu perbaikan jalan, pengaddan alat tangkap, perbaikan jl tanggul.
- Berikut adalah hasil serap aspirasi masyarakat oleh sigit selaku Anggota DPRD dapil 4 yaitu bantuan hiba untuk pembangunan jalan, bantuan untuk pembanguan masjid.
- Berikut adalah hasil serap aspirasi masyarakat oleh Drs.Mutoyo, selaku Anggota DPRD dapil 4 yaitu pembangunan mushola, renovasi TPA, pembangunan jalan.
- Berikut adalah hasil serap aspirasi masyarakat oleh Matlubur Rifai, selaku Anggota DPRD dapil 4 yaitu rehab ruang belajar madin, pengadaan sarana prasarana, computer, pemeliharaan Gedung pembanguan MCK.
- Berikut adalah hasil serap aspirasi masyarakat oleh Darwoto, selaku Anggota DPRD dapil 4 yaitu penanganan banjir, penanganan sampah yang ada di sawokecik.

Daerah Pilihan 5: Kalitengah, Karanggeneng, Maduran, Sekaran, Sukodadi, Turi Adapun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lamongan Dapil 5 yaitu H.Ali Afandi, Nur Hasyim, S.IP., Anshori, S.Sos., HJ.Ning Darwati, RatnaMutia Marhaeni, S.H., M.Kn, Moch Dahlan, Hamzah Fansyuri, S.H., M.H., Ir.Sugeng Santoso, Nahdliyah Kartika Agustin.

- Berikut adalah hasil serap aspirasi masyarakat oleh HJ.Ning Darwati selaku Anggota DPRD dapil 5 yaitu pembangunan

masjid, rehabilitas dam/bendungan sekarputih, pembangunan jalan, pembangunan TPT, Pembangunan jalan lingkar.

- Berikut adalah hasil serap aspirasi masyarakat oleh Ir.Sugeng Santoso selaku Anggota DPRD dapil 5 yaitu saluran pengairan pertanian , pengadaan pompa air besar, pengaspalan jalan.
- Berikut adalah hasil serap aspirasi masyarakat oleh Nur Hasyim, S.IP., selaku Anggota DPRD dapil 5 yaitu pembangunan jalan, salurab air, tunjangan hari raya untuk guru diniyah
- Berikut adalah hasil serap aspirasi masyarakat oleh hamzah fansyuri., selaku Anggota DPRD dapil 5 yaitu pembangunan masjid, pembangunan mushola, pembangunan Tpt.

Dapat peneliti simpulkan sampai pada waktu reses 2024 masih banyak masyarakat Lamongan yang masih mengeluh tentang infrastuktur yang ada di Lamongan, air bersih yang masih sulit untuk didapatkan, normalisasi saluran air, pendidikan dan Kesehatan yang belum merata, petani masih sulit mendapatkan bantuan pupuk. Peneliti melihat atau membandingkan dengan kabupaten lain lamongan masih sangat banyak untuk diperbaiki. Resap aspirasi bukan hanya menjadi ajang mendengarkan keluhan, tetapi juga menjadi momentum untuk Mempererat hubungan antara wakil rakyat dan rakyat yang mereka layani.semangat gotong royong dan kebersamaan yang tercipta selama resap aspirasi menjadi modal berharga untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan oleh masyarakat Lamongan kedepannya dan bukan hanya sekedar formalitas para anggota DPRD sebagai menggugurkan kewajiban maupun tugas saja.

Sifat Monitoring Kedewanan dalam Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat

Monitoring kedewanan merupakan salah satu aspek penting dalam fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah daerah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Di DPRD Lamongan, proses monitoring ini memegang peranan krusial dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui Program RESAP (Revolusi Sosial Aspirasi Publik). Monitoring yang

efektif tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi masalah dan kekurangan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintahan daerah.

Monitoring kedewanan adalah proses pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah . Sifat monitoring ini bersifat terus-menerus dan melibatkan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks DPRD Lamongan, monitoring ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan program, anggaran, serta keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan.

Pentingnya monitoring kedewanan terletak pada kemampuannya untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, monitoring yang efektif dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pemerintah.

Proses monitoring dalam DPRD Lamongan melibatkan beberapa tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Tahap perencanaan mencakup penentuan indikator kinerja dan target yang jelas, serta penyusunan rencana monitoring yang komprehensif. Pada tahap pelaksanaan, anggota dewan melakukan pengumpulan data melalui berbagai metode seperti survei, wawancara, dan observasi lapangan.

Evaluasi merupakan tahap kritis di mana data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program sesuai dengan rencana. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi perbaikan. Tahap tindak lanjut melibatkan penyampaian rekomendasi kepada pihak eksekutif dan pemantauan pelaksanaan perbaikan yang telah disarankan.

Meskipun monitoring kedewanan memiliki peran penting, pelaksanaannya seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun tenaga. Anggota dewan sering kali harus

mengatasi keterbatasan ini dengan cara yang kreatif, seperti bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi monitoring.

Selain itu, resistensi dari pihak eksekutif dan birokrasi juga dapat menjadi hambatan. Kadang-kadang, pihak eksekutif mungkin kurang kooperatif dalam memberikan informasi yang diperlukan atau dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh dewan. Dalam situasi seperti ini, DPRD perlu membangun komunikasi yang lebih efektif dan membangun kesadaran akan pentingnya monitoring untuk kepentingan bersama.

Dalam era digital, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memainkan peran yang semakin penting dalam mendukung proses monitoring kedewanan. Penggunaan platform online, aplikasi mobile, dan media sosial dapat membantu anggota dewan dalam mengumpulkan data secara lebih efisien dan mendistribusikan informasi kepada masyarakat dengan lebih cepat. Misalnya, DPRD Lamongan dapat memanfaatkan aplikasi mobile untuk memfasilitasi pelaporan aspirasi masyarakat secara real-time. Masyarakat dapat mengirimkan laporan, keluhan, atau masukan melalui aplikasi ini, yang kemudian dapat langsung diakses oleh anggota dewan. Selain itu, media sosial juga dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan cara mempublikasikan hasil monitoring dan tindak lanjut yang telah dilakukan.

Partisipasi aktif masyarakat merupakan komponen kunci dalam monitoring kedewanan yang efektif. Masyarakat tidak hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai pengawas dan pemberi masukan yang berharga. DPRD Lamongan harus mendorong partisipasi ini melalui berbagai cara, seperti mengadakan forum publik, diskusi kelompok terfokus, dan konsultasi langsung dengan berbagai kelompok masyarakat. Pelibatan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pemimpin komunitas lokal juga penting untuk memastikan bahwa aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat terwakili. Dengan cara ini, DPRD dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai kondisi di lapangan dan kebutuhan masyarakat.

Mengukur efektivitas monitoring kedewanan adalah langkah penting untuk

memastikan bahwa proses ini memberikan hasil yang diharapkan. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas ini meliputi tingkat partisipasi masyarakat, jumlah dan kualitas rekomendasi yang diberikan, serta tingkat implementasi dari rekomendasi tersebut oleh pihak eksekutif. Selain itu, feedback dari masyarakat mengenai proses dan hasil monitoring juga dapat menjadi indikator penting. DPRD Lamongan perlu melakukan survei atau jajak pendapat secara berkala untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap kinerja monitoring yang dilakukan. Dengan demikian, dewan dapat melakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas monitoring di masa mendatang.

Solusi Pembentukan Kebijakan Publik yang Ideal

Dalam upaya melaksanakan pembentukan kebijakan publik yang sesuai dengan mekanisme ideal melalui Program Resap Aspirasi Masyarakat di DPRD Lamongan, terdapat berbagai masalah di lapangan yang perlu diatasi. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diimplementasikan untuk menghadapi tantangan tersebut:

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Masalah Partisipasi masyarakat yang rendah dan keterbatasan akses informasi. Terkait solusinya yaitu Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan kampanye sosialisasi secara intensif melalui media massa, media sosial, dan pertemuan langsung untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam Program Resap Aspirasi Masyarakat di DPRD Lamongan. Forum Konsultasi Publik: Menyelenggarakan forum konsultasi publik secara berkala di berbagai kecamatan dan desa untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat. Pelibatan Tokoh Masyarakat: Melibatkan tokoh masyarakat, pemimpin komunitas, dan organisasi lokal dalam proses sosialisasi untuk menjangkau lebih banyak warga dan meningkatkan kepercayaan publik.

Memperbaiki Sistem Pengumpulan dan

Pengolahan Data Masalah: Data yang tidak akurat atau tidak memadai, Solusinya yaitu Penggunaan Teknologi: Mengadopsi teknologi informasi seperti aplikasi mobile dan platform online untuk pengumpulan data aspirasi masyarakat secara real-time dan lebih akurat,

Pelatihan SDM: Memberikan pelatihan kepada petugas lapangan dan staf DPRD dalam teknik pengumpulan dan analisis data yang efektif. Kerjasama dengan Institusi Akademik: Bekerjasama dengan universitas dan lembaga penelitian untuk melakukan survei dan studi lapangan yang mendalam.

Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
Terkait masalah Kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Solusinya yaitu Publikasi Rutin: Menyediakan laporan berkala mengenai perkembangan Program Resap Aspirasi Masyarakat di DPRD Lamongan dan hasil-hasil yang telah dicapai melalui website resmi DPRD dan media sosial. Sistem Monitoring Terbuka: Mengembangkan sistem monitoring terbuka yang memungkinkan masyarakat untuk melacak perkembangan aspirasi mereka dan bagaimana pemerintah menindaklanjutinya.

Mengatasi Birokrasi yang Rumit

Terkait Masalah Proses birokrasi yang lambat dan tidak efisien. Solusinya yaitu Simplifikasi Prosedur: Menyederhanakan prosedur birokrasi terkait pengumpulan dan penanganan aspirasi masyarakat untuk mempercepat respons pemerintah. Pelatihan Birokrasi: Mengadakan pelatihan dan workshop bagi pegawai negeri sipil untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menangani aspirasi masyarakat. Penggunaan E-Government: Mengimplementasikan sistem e-government untuk mengotomatisasi proses administrasi dan meningkatkan kecepatan serta transparansi dalam penanganan aspirasi.

Meningkatkan Koordinasi Antar Lembaga
Terkait Masalah Kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah. Solusinya yaitu Membentuk tim koordinasi khusus yang terdiri dari perwakilan berbagai instansi terkait untuk memastikan sinergi dalam pelaksanaan Program Resap Aspirasi Masyarakat di DPRD Lamongan. Mengadakan rapat koordinasi berkala untuk membahas perkembangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk memfasilitasi pertukaran data dan informasi antara lembaga-lembaga pemerintah.

1. Responsivitas terhadap Kritik dan Umpan Balik

Terkait Masalah Kurangnya responsivitas terhadap kritik dan umpan balik dari masyarakat.

Solusinya yaitu Menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, dan keluhan. Membentuk tim respons cepat untuk menangani keluhan dan memberikan tanggapan yang cepat dan tepat. Melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan dan tindakan yang diambil berdasarkan umpan balik masyarakat dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

2. Memastikan Pendanaan dan Sumber Daya yang Memadai

Terkait Masalah Kurangnya pendanaan dan sumber daya untuk menjalankan program. Solusinya yaitu Melibatkan masyarakat dalam proses penganggaran untuk memastikan alokasi dana yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan mereka. Mencari sumber dana alternatif, termasuk kerjasama dengan sektor swasta dan lembaga donor internasional. Meningkatkan kapasitas pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana yang efisien dan transparan.

Untuk mengatasi masalah yang muncul di lapangan dalam pelaksanaan Program Resap Aspirasi Masyarakat di DPRD Lamongan, diperlukan solusi yang komprehensif dan terkoordinasi. Memperkuat partisipasi masyarakat, memperbaiki sistem pengumpulan dan pengolahan data, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, menyederhanakan birokrasi, meningkatkan koordinasi antar lembaga, responsif terhadap kritik dan umpan balik, serta memastikan pendanaan yang memadai adalah langkah-langkah penting yang harus diambil.

Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini, DPRD Lamongan dapat memastikan bahwa kebijakan publik yang dibentuk melalui Program Resap Aspirasi Masyarakat di DPRD Lamongan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta dilaksanakan dengan mekanisme yang ideal. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas.

Untuk menciptakan sebuah kebijakan publik yang ideal dari program resap aspirasi masyarakat yang diusulkan oleh DPRD

Lamongan, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Tantangan utama yang dihadapi adalah masalah pendanaan yang kurang serta potensi urusan pribadi dewan yang dapat mengganggu integritas dan efektivitas program tersebut. Selain itu, perlu dicermati bahwa program resap aspirasi masyarakat seringkali hanya difungsikan sebagai alat untuk menggugurkan kewajiban tanpa memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan harus mengatasi tantangan ini secara menyeluruh.

Pertama-tama, terkait dengan masalah pendanaan yang kurang, solusi dapat diarahkan pada upaya diversifikasi sumber pendanaan. DPRD Lamongan perlu bekerja sama dengan pihak swasta melalui program kemitraan publik-swasta (PPP) untuk mendapatkan dukungan keuangan tambahan. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran yang sudah ada untuk memastikan penggunaannya yang efisien dan tepat sasaran. Dalam hal ini, diperlukan keterlibatan aktif dari Komisi Anggaran DPRD Lamongan untuk memastikan bahwa anggaran dialokasikan dengan bijaksana sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, untuk mengatasi potensi urusan pribadi dewan yang dapat mengganggu integritas program, langkah-langkah penguatan etika dan kode etik bagi anggota dewan perlu diperkuat. DPRD Lamongan harus memberlakukan mekanisme pengawasan internal yang ketat serta memperkuat sistem pelaporan dan penindakan terhadap pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota dewan. Selain itu, perlu ditingkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran serta keputusan yang diambil oleh anggota dewan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang.

Lebih lanjut, untuk mengubah orientasi program resap aspirasi masyarakat dari sekadar menggugurkan kewajiban menjadi alat yang efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, diperlukan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi program. DPRD Lamongan harus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan kebijakan dengan mengadakan forum konsultasi dan diskusi publik secara

rutin. Selain itu, perlu dilakukan upaya penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban serta cara berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan.

Selain itu, penting juga untuk memperkuat kapasitas lembaga dan aparatur pemerintah daerah dalam mengelola program resap aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien. DPRD Lamongan perlu meningkatkan pelatihan dan pendampingan bagi staf administrasi dan petugas lapangan agar mampu mengelola program dengan baik dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Pembentukan kebijakan publik yang ideal dari program resap aspirasi masyarakat memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, termasuk DPRD Lamongan, pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan program ini dapat memberikan dampak yang positif dan signifikan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lamongan.

4. KESIMPULAN

Untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul di lapangan dalam pelaksanaan Program Resap Aspirasi Masyarakat di DPRD Lamongan, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Beberapa solusi yang dapat diterapkan mencakup peningkatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, edukasi, dan pelibatan tokoh masyarakat; perbaikan sistem pengumpulan dan pengolahan data dengan teknologi informasi dan kerjasama akademik; peningkatan transparansi dan akuntabilitas dengan publikasi rutin, sistem monitoring terbuka, dan audit independen; penyederhanaan birokrasi melalui pelatihan, simplifikasi prosedur, dan penggunaan e-government; peningkatan koordinasi antar lembaga dengan tim khusus dan sistem informasi terintegrasi; peningkatan responsivitas terhadap kritik dan umpan balik dengan mekanisme pengaduan dan evaluasi berkelanjutan; serta memastikan pendanaan yang memadai melalui penganggaran partisipatif dan diversifikasi sumber dana. Dengan implementasi solusi-solusi ini, DPRD Lamongan dapat memastikan bahwa kebijakan publik yang dibentuk melalui Program Resap Aspirasi Masyarakat benar-benar

mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta dilaksanakan dengan mekanisme yang ideal, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tentu saja ucapan terima kasih kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan juga tidak lupa tentunya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lamongan atas keterlibatannya yang sangat cukup banyak terhadap penulisan jurnal yang berjudul TANTANGAN PROGRAM RESAP ASPIRASI MASYARAKAT OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN LAMONGAN STUDI KASUS DPRD LAMONGAN Kami ucapkan terima kasih dengan pihak yang terlibat tentunya serta membantu dalam penyusunan jurnal ini. sehingga kami selaku penyusun jurnal ini dapat menyelesaikan penyelesaian jurnal ini secara tepat pada waktunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahri, R., & Andri, S. (2021). Efektivitas Penggunaan Dana Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat. *Jurnal Niara*, 14(1), 266-275.
- Dilla, I. U., Nasution, M. A., & Suriadi, A. (2020). Efektivitas Program Reses DPRD Kota Medan dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat di Kecamatan Medan Labuhan. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 6(4).
- Goni, M. G., Nayoan, H., & Liando, D. (2019). Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Anggota DPRD Di Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2014-2019. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Kurniasih, D., & Rusfiana, Y. (2021). Fungsi Reses Anggota DPRD Dalam Mengartikulasikan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Bandung. *Jurnal Academia Praja*, 4(2), 380-395.
- Suharti, B. (2014). SOSIALISASI POLITIK DAN KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DEWAN DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK DAN MENJARING ASPIRASI MASYARAKAT (Studi pada DPRD Kota

Bandar Lampung dari Partai Demokrat Masa Bakti 2009-2014). *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 16(2), 67-76.

- Setiyowati, L., & Ispriyarso, B. (2019). Upaya preventif dalam rangka pengawasan terhadap APBD melalui penjangkaran aspirasi masyarakat oleh DPRD. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 250-265.
- Utomo, E. P., & Cangara, H. (2013). Strategi Komunikasi Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Adat Oleh Anggota Dprd Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat. *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 351-360.